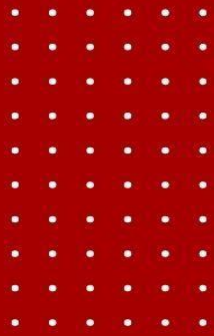




PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

@dkp3a.kaltim

2024

Jl. Dewi Sartika No. 13 Telp. (0541) 747481
E-mail : dkp3akaltim1@gmail.com
Web : dkp3a.kaltimprov.go.id
SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan menyajikan capaian atas tujuan daerah, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kurun waktu 3 (tiga) tahun. Hasil pencapaian kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Samarinda, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur,




H. Norwani Sorayalita, SE, MMT
Pembina Utama Muda

NIP. 19651215 198601 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

➤ **Penyusunan Laporan**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja mengukur ketercapaian kinerja berdasarkan Perjanjian kinerja, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. LKJIP DKP3A Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan tingkat kemampuan instansi dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai visi, misi, tugas, fungsi serta tujuan yang berkorelasi dengan Tujuan, Visi Misi Pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur. Capaian terhadap sasaran pembangunan dilihat melalui capaian indikator kinerja, target dan realisasi serta seraoan anggaran yang dianalisa mmendalam sehngga dapat menggambarkan proses kinerja, kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan.

➤ **Pengukuran Kinerja**

Setelah dilakukan penyelarasan sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2024 - 2026 ditentukan isu strategis, indikator kinerja, capaian sasaran dan berbagai kegiatan. Untuk itu pembangunan 3 (tiga) urusan yaitu urusan pelayanan adminisitrasi kependudukan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menetapkan 6 (enam) tujuan dan 6 (enam) sasaran. Keenam tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja.

Ringkasan capaian Kinerja pelayanan dan anggaran Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dikatakan berhasil dengan uraian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT	23,46	47,66	203	5.668.717.524	4.911.855.995	86,65
2	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	400	400	100	4.250.481.300	3.788.160.637	89,12
3	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	100	100	100	2.810.624.000	2.691.295.872	95,75
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	2,53	1,93	131	2.733.258.000	2.536.710.713	92,81
5	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	75	100	133	957.365.000	845.963.848	83,36
6	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	70,50	75,50	107	23.657.029.172	22.120.618.109	93,51
Total					40.077.474.996	36.894.635.174	92,06

➤ **Pemanfaatan Laporan**

- Mengukur kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR LAMPIRAN	8
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	10
B. Tugas dan Fungsi	10
C. Struktur Organisasi	12
D. Sumber Daya Manusia	13
E. Aspek Strategi Organisasi	14
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	17
G. Sarana dan Prasarana Kerja	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	21
B. Indikator Kinerja Utama	31
C. Perjanjian Kinerja.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya	36
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	42
C. Analisis Capaian Kinerja	43
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	78
E. Realisasi Anggaran.....	78
F. Evaluasi Budaya Kerja	

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

TABEL

1.1	Jumlah Pegawai DKP3A Menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan	13
1.2	Sarana dan Prasarana Di lingkungan DKP3A	18
2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 3 Tahun	20
2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran	22
2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) DKP3A tahun 2024 - 2026	26
2.4	Indikator Perjanjian Kinerja (PK) DKP3A Tahun 2024	29
2.5	Target Belanja DKP3A Tahun 2024	30
2.6	Anggaran Per Sasaran Strategis	31
3.1	Anggaran Per Sasaran 2023	32
3.2	Tindak Lanjut hasil evaluasi Inspektorat	32
3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	34
3.4	Sasaran 1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja	35
3.5	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	35
3.6	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	36
3.7	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	36
3.8	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	37
3.9	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran	38
3.10	Sasaran 2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja	38
3.11	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	39
3.12	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	39
3.13	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	40
3.14	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	41
3.15	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran	41
3.16	Sasaran 3 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja	42
3.17	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	44
3.18	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	44



3.19	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	45
3.20	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	46
3.21	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran	46
3.22	Sasaran 4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	47
3.23	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	48
3.24	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	48
3.25	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	49
3.26	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	50
3.27	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran	50
3.28	Sasaran 5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	51
3.29	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	51
3.30	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	52
3.31	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	52
3.32	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	53
3.33	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran	53
3.34	Sasaran 6 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	54
3.35	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	54
3.36	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	55
3.37	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	55
3.38	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	56
3.39	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran	56
3.40	Pencapaian SDG's Tahun 2024	57
3.41	Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja	58
3.42	Realisasi anggaran per program kegiatan	59



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024
2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja DKP3A
3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra DKP3A Prov. Kaltim
4. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DKP3A Tahun 2024
6. Cascading DKP3A

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pembentukan DKP3A Provinsi mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Maka ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sistem data gender dan anak;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota.

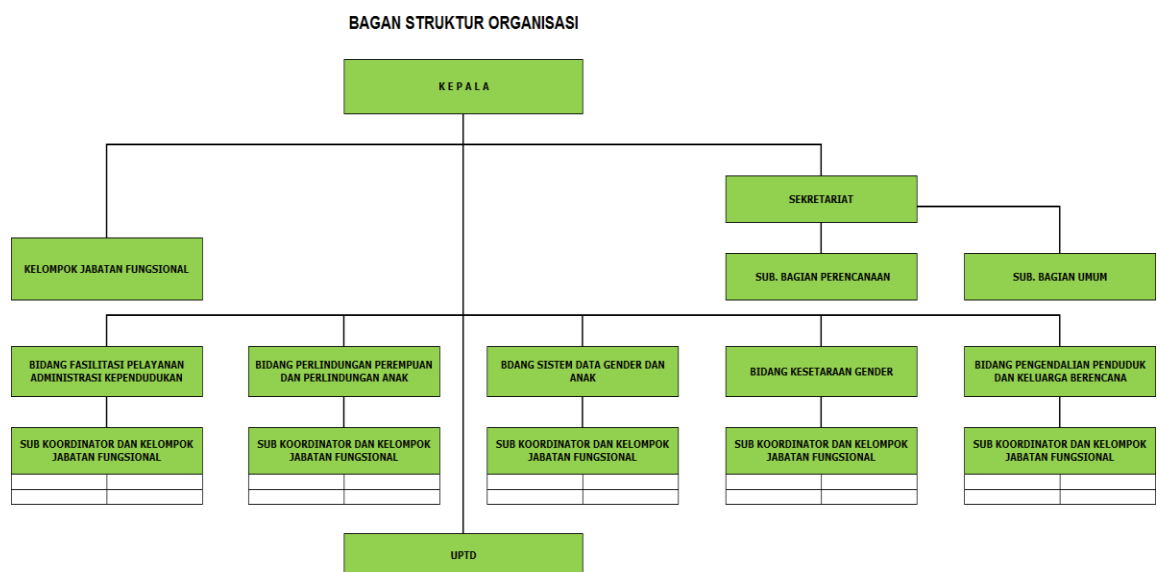
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, UPTD PPA, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pemantuan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi merupakan komponen-komponen penyusun pemerintahan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan struktur ini, pekerjaan akan berjalan lebih optimal dan seorang atasan pun bisa memberikan tugas kepada bawahannya secara adil serta sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seorang atasan pun juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar : Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, dapat digambarkan bahwa Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur membawahi :

a. Sekretariat

Terdiri dari Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan Program

b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdiri dari Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang Kesetaraan Gender

Terdiri dari subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Sistem Informasi Data Gender dan Anak

Terdiri dari subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdiri dari subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terdiri dari subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

g. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

D. SUMBER DAYA APARATUR

Pegawai di lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 69 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 39 orang dan Non ASN 30 orang. Pegawai ASN terdiri dari 19 orang Laki-Laki dan 20 orang Perempuan. Tingkat pendidikan pegawai merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi, dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan golongan pegawai mempermudah penempatan berdasarkan kebutuhan, kesesuaian tugas dan peran pegawai guna pencapaian kinerja secara efektif, efisien dengan memperhatikan pengembangan kompetensi setiap pegawai.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai DKP3A Menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	S-2	S-1	D-III	SLT A	SLTP	SD
Kepala Dinas	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	4	2	5	-	-	-	5	1	-	-	-	-
Kasi/ Kasubbag	4	1	2	3	-	-	2	3	-	-	-	-
Fungsional Umum	10	15	3	21	1	-	5	7	2	2	-	-
Fungsional Tertentu	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
Jlh PNS	19	20	11	26	2	-	13	21	3	2	-	-
Jlh Honor/PTT	16	14	-	-	-	-	1	20	2	7	-	-
Jlh PNS + Honor/PTT	35	34	11	26	2	-	14	41	5	9	-	-

Keterangan : Data per 31 Desember 2024

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Kalimantan timur dilakukan melalui identifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari tujuan organisasi, melalui analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan melalui Sasaran Strategis sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak

Persentase capaian kinerja DKP3A Provinsi Kaltim

Sasaran 2 : Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi

Merumuskan jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)

Menentukan jumlah Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)

Sasaran 3 : Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan

Merumuskan Presentase Presentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun

Sasaran 4 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana

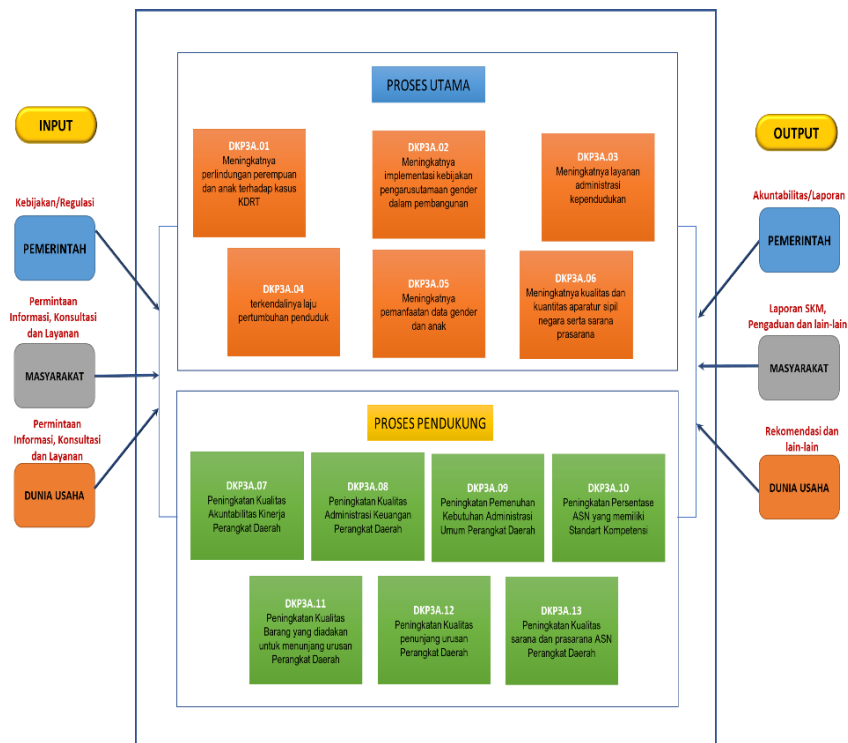
Merumuskan Angka Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak

Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah

Sasaran 6 : Meningkatnya Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan anak Provinsi Kalimantan

Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim



Gambar : Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Analisis sasaran strategis Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menjadi Proses Bisnis yang diuraikan menjadi proses utama, proses bisnis manajemen dan proses bisnis pendukung. Peta Proses Utama ini diambil dari Sasaran yang ingin dicapai melalui Renstra dalam setiap tahunnya sampai lima tahun mendatang.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Permasalahan utama Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam beberapa poin di bawah ini :

1. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.

- Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.
 - Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suami/anak laki-lakinya.
 - Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.
2. Permasalahan terkait Perlindungan Hak Perempuan:
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - ✓ Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi tidak optimal karena terdapat kasus yang tidak dilaporkan, masyarakat masih enggan melaporkan karena menanggung aib keluarga, atau karena tidak mengetahui lembaga layanan.
 - ✓ Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas
 - ✓ Belum tersedianya data perempuan tenaga kerja korban kekerasan
 - Masih rentannya perempuan dan anak dari tindak pornografi dan kekerasan
 - Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.
 - Belum optimalnya peran lembaga pemerhati perempuan dalam pemenuhan perlindungan hak perempuan.
3. Permasalahan terkait Perlindungan Anak:
- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografidan *cyber crime*.

- Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
 - Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
 - Angka anak Putus sekolah yang cukup tinggi.
 - Belum sepenuhnya sistem perlindungan di provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan baik.
4. Permasalahan terkait Tumbuh Kembang Anak:
- Kurangnya pengetahuan/informasi tentang pengasuhan dan pembinaan keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anak korban kekerasan.
 - Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 - Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
 - Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.
5. Permasalahan terkait Sistem Informasi Gender dan Anak.
- Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan terupdate
 - Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak
 - Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan anak.
 - Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak
6. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan KB
- Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh kompetensi rawan menjadi kelompok marjinal
 - Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan.

- Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga
 - Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB
 - Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia pernikahan pertama belum optimal.
7. Permasalahan terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Kurang optimalnya fungsi organisasi/lembaga penyedia data dalam penyediaan data terpilah atau data gender.
 - Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait

G. SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana dan kondisinya yang dimiliki DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Di lingkungan DKP3A
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	4.213,67	m2
2	Gedung	3	Unit
	Gedung 1	1.440	m2
	Gedung 2	350	m2
	Gedung 3	48	m2
	Mushola	36	m2
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	2	Jaringan
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	1	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Aula	1	Ruang
10	Koperasi	-	-
11	Taman Dalam	-	-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 tertuang dalam Renstra DKP3A Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang telah disusun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun bertujuan untuk mewujudkan kinerja Output maupun Outcome, serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2022 dan melaporkannya dalam dokumen LKjIP, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada Tahun 2024, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 6 (enam) Tujuan dan 6 (enam) Sasaran, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 3 Tahun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja/Sasaran pada tahun ke-			Ket
					2022	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	96	97	98	99	
		Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Poin	70.46	70.50	S	71.50	
2	Meningkatkan Daya Saing Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,89	67,31	67,64	67,98	
		Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)	Lembaga PEKKA	0	2	2	2	
			Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	0	400	300	300	
3	Meningkatkan Upaya perlindungan hak Perempuan dan		Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0.018	0.030	0.025	0.020	



	anak Provinsi Kalimantan Timur								
		Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	24.96	23.46	23.23	23.11	
4	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas		Persentase Peningkatan ketersediaan data gender dan anak	%	65	75	80	85	
		Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	%	65	75	80	80	
5	Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana		Angka Kelahiran Total (Total Fertility/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	%	2.18	2.10	2.10	2.10	
		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.33	2.53	2.63	2.73	
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		Persentase Kepemilikan KTP-el se Kaltim	%	99.3	99.4	99.5	99.6	
			Persentase Kepemilikan KIA se Kaltim	%	50	60	70	80	
			Persentase Kepemilikan Akta Kel Anak se Kaltim	%	98	98,5	99	99.5	
		Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	

Tabel 2.2
 Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Upaya perlindungan hak perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
							Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi					



				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
					Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi



2	Meningkatkan Daya Saing Perempuan	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan & program, pemantauan evaluasi dan pelaporan	%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
							Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Advokai Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
							Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
							Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
3	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	%	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
							Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
4	Meningkatkan Kuaitas Pelayanan Adminsitrase Kependudukan	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
							Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
						Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil

						Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
						Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
5	Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
							Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga

					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<p>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p>	<p>Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana</p> <p>Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja</p>
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<p>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</p>	<p>Advokasi dan Sosialisasi GDPK</p>
							<p>Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK</p>
6	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p>



					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
						Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

 Tabel 2.3
 Indikator Kinerja Utama (IKU) DKP3A tahun 2024 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	%	Data base kependudukan menggambarkan layanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan untuk masyarakat meliputi kepemilikan Kartu Keluarga, Akte, E-KTP, Kartu Identitas Anak, Dll. Ketersediaan administrasi kependudukan sangat diperlukan oleh masyarakat guna mendapatkan kemudahan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dll yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga	ministrasi kependudukan Kab/Kota, Direktorat jenderal kependudukan & catatan sipil Kemendagri	Penyajian Data Kependudukan : Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun $\times 100$ 2 Kali
						Rasio Kepemilikan E-KTP : $\frac{\text{Jumlah perekaman E-KTP}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100$
						Rasio Kepemilikan KIA : $\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak 0-17 tahun}} \times 100$
						Rasio Kepemilikan IKD : $\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki IKD}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100$
2	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan hak anak di Prov. Kaltim	Ratio kekerasan terhadap perempuan, termaksud TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	%	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (sesuai pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)	Simfoni PPPA	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan : $\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100$
		Ratio kekerasan terhadap anak (Per 10.000 penduduk anak)	%			Rasio Kekerasan Terhadap Anak : $\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi Provinsi dan didampingi}}{\text{Jumlah penduduk anak}} \times 100$
3	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada perangkat daerah	%	Data gender atau data pilah merupakan informasi utama yang diperlukan untuk mempertimbangkan waktu, objek, sasaran secara tepat, sehingga program dan kegiatan dapat dicapai optimal. Dengan data gender hasil partisipasi, manfaat dan fungsi kontrol pembangunan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Data gender	Simfoni PPPA	Persentase Data Terpilah Gender dan Anak : $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memberikan data terpilah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$

				dalam pembangunan merupakan mandat RPJMN, RPJMD yang dipedomani dalam pelaksanaan program kegiatan DKP3A dan seluruh perangkat daerah		Jumlah perangkat daerah
4	Meningkatkan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah lembaga (PEKA yang terstandarisasi)	Jumlah lembaga	Melakukan standarisasi terhadap kelompok/perkumpulan masyarakat perempuan kepala rumah tangga agar terstandarisasi sesuai ketentuan penilaian dari Kementerian PPPA	E-Infoduk	Jumlah lembaga PEKA Kabupaten/Kota
		Jumlah PEKA yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah Orang	Jumlah anggota kelompok/perkumpulan perempuan kepala rumah tangga yang akan dibina dan diarahkan dalam pengembangan usaha dalam memperoleh legalitas berusaha (NIB)	E-Infoduk	Jumlah anggota PEKA yang memiliki NIB
5	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	Adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara jumlah desa di Kaltim	BKKBN	$r \equiv \left\{ \frac{P_t}{P_0} \times \left(\frac{1}{t} \right)^{-1} \right\} \times 100$ $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_o)$
						r = laju pertumbuhan penduduk P_t = Jumlah penduduk pada tahun t P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun P_t dengan P_0
						P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke t P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t M_o = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t M_i = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t

C. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Poin	70,50
2	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan	Lembaga PEKKA	2
		Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	400
3	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	23,46
4	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	%	75
5	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.53
6	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100

1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 38.267.474.996,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp. 40.077.474.996,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 38.628.694.763,- dan Belanja Modal Rp. 1.448.780.233,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 36.894.635.174,- (92,06 %) dengan rincian untuk belanja operasi sebesar Rp. 35,594,157,026,- (92,95%) belanja modal sebesar Rp. 1.300.478.148,- (89,76%).

2. Target Belanja DKP3A Provinsi Kaltim

Tabel 2.5
Target Belanja DKP3A Tahun 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Operasi	Rp. 38.628.694.763,-	Rp. 36.894.635.174,-	92,95%
2	Belanja modal	Rp. 1.448.780.233,-	Rp. 1.300.478.148,-	89,76%
	JUMLAH	Rp. 40.077.474.996,-	Rp. 36.894.635.174,-	92,06%

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2024 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.0
Anggaran Per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	23.657.029.172,00	22.120.618.109,00	93,51
Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	4.250.481.300,00	3.788.160.637,00	89,12
Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	3.905.872.664,00	3.300.890.656,00	84,51
Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	957.365.000,00	845.963.848,00	88,36
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	2.810.624.000,00	2.691.295.872,00	95,75
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	2.733.258.000,00	2.536.710.713,00	92,81
Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim (UPTD)	1.762.844.860,00	1.610.995.339,00	91,39
JUMLAH	40.077.474.996,00	36.894.635.174,00	92,06

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

Pada Sub Bab ini disajikan :

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,00	25,50
2	Pengukuran Kinerja	20%	12,60	15,00
3	Pelaporan Kinerja	10%	6,40	6,40
4	Evaluasi Kinerja	20%	14,20	13,40
5	Capaian Kinerja	20%	15,20	15,20
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	72,40	75,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tabel 3.2

Tindak Lanjut hasil evaluasi Inspektorat

NO	KOMPONEN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	OUTPUT	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	
1	Perencanaan Kinerja	1	Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dari hasil analisis capaian kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya (LHE tahun 2022) secara menyeluruh serta melaksanakan reviu pohon kinerja dan cascading	Reviu rekomendasi LHE tahun sebelumnya (2022) dan pohon kinerja/cascading	Oktober tahun 2024
			Reviu dokumen perencanaan kinerja secara menyeluruh dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja	Berita acara hasil reviu perencanaan kinerja tahun 2023		



				untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik.		
2	Pengukuran kinerja	1	Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Analisa mutasi jabatan terkait penghapusan dan pengurangan/penambahan jabatan	Notulensi rapat terkait pembahasan mutasi Jabatan terkait penghapusan dan pengurangan/penambahan jabatan	Oktober tahun 2024
		2	Menggunakan informasi dari dokumen pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, pengusulan penyesuaian refocusing organisasi dan penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja organisasi			
		3	Melakukan Sosialisasi agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan			
3	Pelaporan kinerja	2	Dokumen laporan kinerja menginfikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya,	Membandingkan nilai sakip Provinsi Kaltim (77,89) dengan nilai Sakip DKP3A dan memuat perbandingan kinerja 3 tahun sebelumnya serta	LKJIP tahun 2024	1 September 2024



			perbandingan realisasi kinerja di level Provinsi, serta upaya perbaikan/penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	membandingkan capaian indikator kinerja RPJMD		
		3	Menggunakan informasi kinerja berkala untuk penyesuaian aktifitas, penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Menambahkan upaya perbaikan pada capaian indikator yang belum tercapai	LKJIP tahun 2024	Oktober tahun 2024
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	1	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti secara keseluruhan	Melaksanakan tindak lanjut evaluasi rekomendasi tahun sebelumnya (LHE tahun 2022) secara menyeluruh	Reviu rekomendasi LHE tahun sebelumnya (2022)	Oktober tahun 2024
		2	Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Meningkatkan capaian kinerja agar dapat melebihi target yang direncanakan	LKJIP tahun 2024	Oktober tahun 2024
		3	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat			

			meningkatkan kinerja organisasi			
5	Capaian akuntabilitas kinerja	1	Melakukan perbaikan target kinerja yang dapat dicapai sehingga capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	Melaksanakan tindak lanjut evaluasi rekomendasi tahun sebelumnya (LHE tahun 2022) secara menyeluruh	LKJIP tahun 2024	Oktober tahun 2024

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi di lingkungan DKP3A tahun 2024 tertera dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk	%	23,46	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	23,46	47,67
2	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan	Lemba PEKKA	2	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	2	3
		Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	400	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV		400
3	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	100	100
4	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,53	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	2,53	1,93
5	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat	%	75	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	75	100



		Daerah					
6	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	70,50	Triwulan I		
					Triwulan II		
					Triwulan III		
					Triwulan IV	70,50	75,50

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.4
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk	%	23,46	47,67	203

Data yang tersedia bersumber dari aplikasi kementerian PPPA RI yaitu simfoni PPA yang di input setiap bulan oleh setiap daerah. Tahun 2024 pada indikator kinerja Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk memiliki target 23,46 % dengan realisasi capaian sebesar 47,67 % dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100.000$$

$$\frac{946}{1.929.894} \times 100.000 = 47,67$$

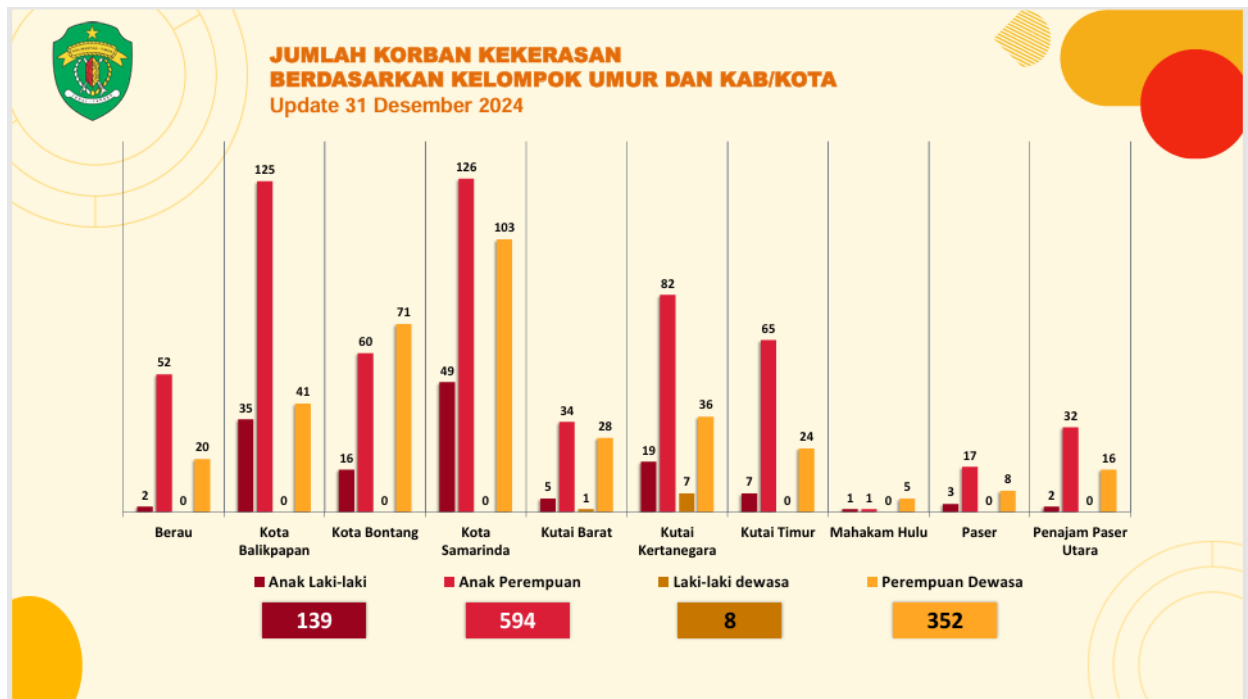
2.

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Salah satu bentuk ketidaksetaraan gender adalah tindak kekerasan. Tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga semakin meningkat yang korbannya banyak dialami oleh perempuan dan anak. Untuk melakukan pencegahan, pelayanan penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta penguatan kelembagaan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi masyarakat.

Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan terjadi kasus kekerasan pada perempuan dan anak-anak, hal itu terjadi karena adanya sarana teknologi diseluruh kab/kota yang memungkinkan melakukan percepatan dalam pelaporan, secara lengkap dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik jumlah kasus kekerasan Tahun 2024 berdasarkan kelompok umur dan kab/kota



Sumber data : Simfoni (DKP3A Provinsi Kaltim)

Kasus kekerasan bersifat gunung es hanya permukaannya saja yang nampak namun kasus kekerasan sesungguhnya tidak terduga karena tidak adanya pelaporan kepada bidang layanan.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2024
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	93,58	100	107

Merujuk pada Kewenangan Urusan PPPA di Provinsi yang dimandatkan dalam UU 23 thn 2014 bahwa Pemerintah Provinsi wajib memberikan layanan perlindungan bagi korban se Kalimantan Timur maka data menjadi pertimbangan pertama dan utama sebagai bahan untuk menentukan kebijakan, strategi, perencanaan, program dan kegiatan pelayanan terhadap korban.

Pada tahun 2022 dan 2023 masih mengacu pada Renstra tahun 2019 – 2023 sehingga ada perbedaan sasaran dan indikator pada tahun 2024. Namun untuk realisasi kinerja mengalami kenaikan kinerja di tahun 2023 dengan realisasi 100%. Tahun 2024 sasaran mengalami perubahan indikator karena menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKP3A Provinsi Kaltim Tahun 2024 – 2026. Pada sasaran 1 yaitu meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim mengalami perubahan indikator yaitu Ratio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan), dengan target 23,46 % dan capaian kinerja 47,67 %. dan indikator tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Daerah (IKD) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu terdapat indikator tentang rasio Ratio Kekerasan terhadap anak, per 10.000 anak dengan target 2 % dan mencapai realisasi senilai 0,51 %

- a. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang strategis organisasi

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2024)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	%	23,11	47,67	206

b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.7

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	%	47,67	Tidak ada realisasi nasional	-

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

d. **Faktor Keberhasilan :**

1. Proses pelaporan kasus kekerasan melalui aplikasi SIMFONI PPPA Prov. Kaltim secara online yang dilakukan secara berjenjang dari Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Kementerian PPPA RI secara rutin
2. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan
3. Kesadaran masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan tindak kekerasan

Faktor Kegagalan :

1. Masih rendahnya upaya pencegahan terhadap pemahaman kekerasan dan diskriminasi perempuan

Alternatif Solusi :

1. Melakukan evaluasi program/kegiatan perlindungan perempuan
2. Melaksanakan FGD Program kegiatan perlindungan perempuan
3. Menjalin kerjasama dengan membuat PKS dengan ikatan psikolog klinis wilayah Kaltim dan Dinas PPPA Prov. Kalsel tentang pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran Efisiensi Belanja, untuk menilai seberapa besar efisiensi capaian dari realisasi anggaran. Rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Tabel 3.8
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	47,67	84,51	87 %

$$\text{Rasio Efisiensi Sasaran 1 : } \frac{4.911.855.995}{5.668.717.524} \times 100 = 87 \%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan pada Sasaran 1 Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim adalah sebesar 87 % masuk dalam kategori cukup efisien. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran belanja langsung mempengaruhi tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran apabila penggunaan realisasi anggaran belanja langsung begitu besar maka pengelolaan anggaran tersebut belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai sasaran.

Pada pelaksanaan program kegiatan sasaran 1Capaian kinerja secara umum mengalami peningkatan yang baik, hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik pada belanja perjalanan dinas.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9
 Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	90,00	100,00	1.981.341.360,00	1.641.277.746,00	82,84
2.08.03.1.01	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak</i>	<i>Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan</i>	<i>Lembaga</i>	<i>10,00</i>	<i>9,00</i>	<i>1.378.937.600,00</i>	<i>1.075.596.241,00</i>	<i>78,00</i>
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3,00	3,00	772.137.600,00	501.922.319,00	65,00
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	10,00	10,00	606.800.000,00	573.673.922,00	94,54
2.08.03.1.02	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu</i>	<i>%</i>	<i>75,00</i>	<i>103,00</i>	<i>40.077.474.996,00</i>	<i>565.681.505,00</i>	<i>93,90</i>



2.08.03.1 .02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	30,00	98,00	112.360.000,00	103.723.085,00	92,31
	Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
2.08.03.1 .02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	40,00	50,00	490.043.760,00	461.958.420,00	94,27
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten/ kota layak anak	%	90,00	90,00	40.077.474.996,00	1.758.944.445,00	89,70
2.08.06.1.01	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia</i>	<i>Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA</i>	<i>lembaga</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1.130.890.000,00</i>	<i>952.060.789,00</i>	<i>84,19</i>
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	490.200.000,00	358.114.318,00	73,05
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	perangkat daerah	30,00	30,00	640.690.000,00	593.946.471,00	92,70
2.08.06.1.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak</i>	<i>lembaga</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>829.950.000,00</i>	<i>806.883.656,00</i>	<i>97,22</i>



2.08.06.1 .02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1,00	1,00	659.750.000,00	647.288.861,00	98,11
2.08.06.1 .02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1,00	1,00	170.200.000,00	159.594.795,00	93,77



2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	%	4,07	11,28	1.726.536.164,00	1.511.663.804,00	87,55
2.08.07.1.01	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah</i>	<i>Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan</i>	<i>lembaga</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>566.095.064,00</i>	<i>466.349.970,00</i>	<i>82,38</i>
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	566.095.064,00	466.349.970,00	82,38
2.08.07.1.02	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus</i>	<i>laporan</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>299.066.000,00</i>	<i>278.550.800,00</i>	<i>93,14</i>
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	30,00	67,00	40.077.474.996,00	30.526.000,00	83,17
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	30,00	134,00	262.364.924,00	248.024.800,00	94,53
2.08.07.1.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat</i>	<i>Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>861.375.100,00</i>	<i>766.763.034,00</i>	<i>89,02</i>
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	861.375.100,00	766.763.034,00	89,02

Sasaran 2 : MENINGKATNYA UPAYA PENGUATAN SERTA PENGEMBANGAN KAPASITAS PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN YANG BERDAYA SAING BIDANG POLITIK DAN EKONOMI

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.10

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah lembaga PEKA yang terstandarisasi	Lembaga	2	3	150
2	Jumlah PEKA yang mendapatkan peningkatan kapasitas	orang	400	400	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.11

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2022
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	86,49	83,78	103

Pada tahun 2022 dan 2023 masih mengacu renstra 2019-2023 dengan indikator Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender, sehingga realisasi Perangkat Daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender sebanyak 32 OPD dari 37 OPD sehingga dapat mencapai realisasi kinerja senilai 86,40 %. Sedangkan tahun 2023 turun menjadi 83,78 % karena hanya 31 OPD dari 37 OPD yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender. Tahun 2024 mengacu pada Renstra 2024 – 2026 dengan indikator Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan dan Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA).

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.12

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2024)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah lembaga PEKA yang terstandarisasi	%	2	3	150
	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan (PEKKA)	Orang	300	400	133

Pada indikator Jumlah lembaga PEKA yang terstandarisasi dengan target 2 lembaga telah mencapai target dan dibentuk ada 3 lembaga PEKKA berdasarkan SK Gubernur nomor 100.3.3.1/k.429/2024 tentang penetapan kelompok perempuan kepala keluarga kabupaten/kota Provinsi Kaltim yang terdiri dari 3 kab/kota diantaranya Samarinda, Balikpapan dan kutai karatnegara. Dan target indikator Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan (PEKKA) dengan target 300 orang telah mencapai 400 orang terdiri dari capaian kegiatan di Balikpapan 150 orang, Samarinda 150 orang, Kutai Kartanegara 100 orang (100 peserta NIB dan legalitas)

Selain itu tertuang dalam Indikator Kinerja Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Provinsi Kaltim sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk urusan PPA pada indikator Persentaser ARG pada belanja langsung APBD tahun 2024 dengan target 14 % dan mencapai realisasi sebesar 28,67 % dengan formulasi

$$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD}} \times 100 \%$$

$$\frac{2.661.599.279.549}{9.284.536.632.945} \times 100 \% = 28,67 \%$$

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.13

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)	Lembaga	3	Tidak ada realisasi nasional	
2	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	400	Tidak ada realisasi nasional	

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d

4) **Faktor Keberhasilan :**

- Terlah terbentuknya regulasi terkait PUG (Perda Kaltim no. 2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender)
- Adanya komitmen kepala daerah dengan menjadikan GAP dan GBS sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan asistensi dokumen perencanaan anggaran
- Adanya evaluasi dan pemantauan implementasi PUG dari KPPA dengan memberikan penghargaan berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
- Provinsi dan Kabupaten/Kota telah berupaya untuk memenuhi prasyarat PUG dengan membentuk kelembagaan : Pokja PUG, Tim Penggerak PUG, Tim Teknis dan Focal Point.

Faktor Kegagalan :

- Masih rendahnya upaya pencegahan terhadap pemahaman kekerasan dan diskriminasi perempuan
- Belum optimalnya implementasi PUG pada setiap urusan pembangunan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- Belum terinternalisasinya proses data pilah dalam setiap sektor sehingga penentuan kebijakan tidak melakukan analisa kesenjangan
- Budaya patriarkhi yang melembaga dalam kehidupan masyarakat sehingga munculnya ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki dalam peran pembangunan

Alternatif Solusi :

- Melakukan advokasi koordinasi terkait implementasi PUG
- Melakukan penguatan kelembagaan PUG
- Menyelaraskan keserasian kebijakan PUG di daerah
- Dalam melaksanakan implementasi PUG, 7 prasyarat PUG dalam alur kerja pengarusutamaan gender sekaligus menjadi kerangka input yang harus dibangun dalam implementasi PUG sehingga muncul output yang berkontribusi dalam meningkatkan KKG

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.14

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	3 lembaga 400 orang	89,12 %	89 %

$$\text{Rasio Efisiensi Sasaran 2 : } \frac{3.788.160.637}{4.250.481.300} \times 100 = 89 \%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan pada Sasaran 2 Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi adalah sebesar 89 % masuk dalam kategori cukup efisien.

Pada pelaksanaan program kegiatan sasaran 2 Capaian kinerja secara umum mengalami peningkatan yang baik, hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik pada belanja perjalanan dinas dan honorarium narasumber/tenaga ahli.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.15
 Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.08.2.14 .2.12.01.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					40.077.474 .996,00	36.894.635.17 4,00	92,06
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	orang	400,00	400,00	4.250.481. 300,00	3.788.160.637 ,00	89,12
2.08.02.1 .01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	lembaga	10,00	10,00	1.244.373. 000,00	1.151.047.848 ,00	92,50
2.08.02.1 .01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan	1,00	3,00	462.600.00 0,00	431.158.717,0 0	93,20
2.08.02.1 .01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen	1,00	1,00	178.257.00 0,00	157.581.062,0 0	88,40
2.08.02.1 .01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang	130,00	130,00	603.516.00 0,00	562.308.069,0 0	93,17
2.08.02.1 .02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	lembaga	1,00	1,00	791.514.00 0,00	736.263.364,0 0	93,02



2.08.02.1 .02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan /profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	430,00	430,00	433.257.00 0,00	404.364.663,0 0	93,33
2.08.02.1 .02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik,	Lemba ga	10,00	10,00	358.257.00 0,00	331.898.701,0 0	92,64



		hukum, sosial dan ekonomi							
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	orang	400,00	400,00	2.214.594.300,00	1.900.849.425,00	85,83	
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	Lemba ga	1,00	1,00	170.400.000,00	150.246.436,00	88,17	
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari /Sehat/Pintar/Kepemimpinan /Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Orang	300,00	300,00	1.787.737.300,00	1.535.797.372,00	85,91	
2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	Unit	1,00	0,00	256.457.000,00	214.805.617,00	83,76	

Sasaran 3 : Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.16

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	100

Penyusunan data perkembangan kependudukan Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari data registrasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta data yang berasal dari lintas sektor terkait. Data-data tersebut sudah melalui proses pembersihan serta terkonsolidasi yang dilakukan setiap tanggal 30 Juni (semester I) dan 31 Desember (semester II) dengan data center Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.. Melalui proses tersebut sehingga DKP3A Provinsi Kaltim dapat menyajikan data kependudukan 2 kali dalam 1 tahun

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.17

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2022
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase penduduk yang mendapat layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	100,90	99,80	10 %

Pada tahun 2022 dan 2023 masih mengacu pada Renstra tahun 2019 – 2023 dan formulasinya perhitungan perekaman e KTP dan cetak akte kelahiran dan terdapat perbedaan sasaran dan indikator pada tahun 2024.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.18

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2024)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	100

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.19

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	100

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

6. Faktor Keberhasilan :

- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dll
- SOP untuk mendapatkan administrasi kependudukan mudah dipahami oleh masyarakat
- Kelengkapan kebutuhan data yang dirilis Data Kependudukan Bersih (DKB) persemester melalui Ditjen Dukcapil yang menjadi satu-satunya data yang digunakan untuk semua kepentingan

Faktor Kegagalan :

- Keterbatasan penyediaan blanko E-KTP
- Data Kependudukan Bersih (DKB) tidak tepat waktu sehingga aplikasi E-Infoduk, buku data penduduk persemester dan profil perkembangan kependudukan menjadi terlambat dalam penyajian

- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta pencatatan sipil sehingga cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil belum maksimal dan akurasi data kependudukan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi real di Daerah

Alternatif Solusi :

- Perlu lebih ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dengan Instansi/Lembaga terkait tingkat pusat, dan Pemerintah Provinsi serta Kab/Kota.
- Melakukan pelatihan dan bimtek bagi ADB agar memberikan pelayanan lebih cepat
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya adminduk

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.20

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	100	95.75	96 %

$$\text{Rasio Efisiensi Sasaran 3 : } \frac{2.691.295.872}{2.810.624.000} \times 100 = 96 \%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan pada Sasaran 3 Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan adalah sebesar 96 % masuk dalam kategori kurang efisien. Pada pelaksanaan program kegiatan sasaran 1Capaian kinerja secara umum mengalami peningkatan yang baik, hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik adalah sisa belanja perjalanan dinas.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.21
 Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	70,00	88,23	1.859.900.000,00	1.814.809.483,00	97,58
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	Dokumen	1,00	1,00	1.560.500.000,00	1.532.414.499,00	98,20
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	1,00	1.512.200.000,00	1.490.659.499,00	98,58
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	1,00	48.300.000,00	41.755.000,00	86,45
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	100,00	99,00	426.278.000,00	399.812.727,00	93,79
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	Dokumen	2,00	2,00	40.077.474.996,00	206.983.770,00	91,30
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	1,00	182.600.000,00	170.580.770,00	93,42
2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	1,00	44.100.000,00	36.403.000,00	82,55
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dokumen	2,00	2,00	199.578.000,00	192.828.957,00	96,62
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	1,00	91.460.000,00	86.119.057,00	94,16
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	1,00	108.118.000,00	106.709.900,00	98,70
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Publikasi data kependudukan skala provinsi	kali	2,00	2,00	524.446.000,00	476.673.662,00	90,89
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	%	27,00	100,00	344.100.000,00	304.877.267,00	88,60
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	1,00	150.000.000,00	140.450.662,00	93,63
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	1,00	44.100.000,00	23.103.000,00	52,39



2.12.04.1 .02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	1,00	3,00	150.000.000,00	141.323.605,00	94,22
2.12.04. 1.03	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</i>	<i>Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>180.346.000,00</i>	<i>171.796.395,00</i>	<i>95,26</i>
2.12.04.1 .03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	1,00	48.346.000,00	47.782.275,00	98,83
2.12.04.1 .03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	50,00	60,00	132.000.000,00	124.014.120,00	93,95

Sasaran 4 : TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS KELUARGA BERENCANA

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.22

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,63	1,93	73,38

Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan provinsi menjadi faktor penting dalam analisis demografi Indonesia. Berdasarkan data terbaru periode 2020-2024, terdapat variasi signifikan dalam pertumbuhan populasi di berbagai daerah termasuk di Provinsi Kaltim

Data Laju Perumbuhan Penduduk (LPP) diambil dari sumber data BPS Provinsi Kaltim Tahun 2024 per 30 November 2024 dengan rincian data sebagai berikut :

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Paser	287,0	1,10	7,09	27	107,8
Kutai Barat	178,7	0,99	4,42	13	110,8
Kutai Kartanegara	789,8	2,14	19,52	29	107,9
Kutai Timur	463,0	1,71	11,44	15	115,4
Berau	261,8	1,45	6,47	12	113,8
Penajam Paser Utara	267,7	11,38	6,62	84	105,7
Mahakam Ulu	34,2	1,39	0,85	2	107,7
Kota Balikpapan	717,2	1,10	17,73	1.407	104,2
Kota Samarinda	858,1	0,96	21,21	1.197	103,3
Kota Bontang	188,3	1,37	4,65	1.171	105,3
Kalimantan Timur	4.045,9	1,93	100,00	32	107,3

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.23

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2022
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,33	1,65	0,68 %

Secara kuantitas penduduk Kaltim mengalami peningkatan yang cukup stabil dengan pertumbuhan yang cenderung melambat. Peningkatan ini dipicu tingkat kelahiran yang cukup tinggi seiring dengan meningkatnya migran yang masuk ke wilayah Kaltim. Selain itu salah satu indikator perkembangan wilayah adalah kemudahan, yakni kemudahan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan, sehingga wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap akan lebih cepat berkembang. Sedangkan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 48 kabupaten di Kaltim masih memiliki kepadatan yang relatif rendah. Kabupaten terjarang terletak di Kabupaten Mahakam Ulu dengan kepadatan penduduk hanya sebanyak 2 jiwa per km².

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.24

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2024)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,73	1,93	141 %

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.25

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,93	-	Tidak ada perbandingan kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :

- Tingginya partisipasi pasangan usia subur dalam mengikuti program KB
- Kemudahan pada akses pelayanan KB
- Terbitnya Pergub no. 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai dasar mewujudkan pemahaman SDM ketahanan keluarga

Faktor Kegagalan :

- Adanya pengaruh dari imigrasi penduduk yang cukup tinggi dibandingkan angka kelahiran
- Masih rendahnya pemahaman tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Alternatif Solusi :

- Melakukan edukasi kepada organisasi masyarakat , pemerhati peempuan tentang KB
- Koordinasi dengan Dinas pengampu urusan pengendalian penduduk dan KB dalam upaya peningkatan program KB di Kabupaten/Kota
- Optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas untuk memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga melalui penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa/kelurahan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.26

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,93	92,81	93%

$$\text{Rasio Efisiensi Sasaran 4: } \frac{4.911.855.995}{5.668.717.524} \times 100 = 93 \%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan pada Sasaran 4 Laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 93 % masuk dalam kategori kurang efisien. Pada pelaksanaan program kegiatan sasaran 4 Capaian kinerja secara umum mengalami peningkatan yang baik, hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik pada belanja Honorarium tim dan sisa perjalanan dinas

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.27

Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerj a	Realisas i Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Perse n (%)
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,1	2,18	373.190.000,00	344.906.060,00	92,42
2.14.02.1.01	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	sektor	5,00	5,00	40.077.474.996,00	344.906.060,00	92,42
2.14.02.1.01.000 3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	1,00	1,00	185.890.000,00	185.627.200,00	99,86



2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Laporan	1,00	1,00	187.300.000,00	159.278.860,00	85,04
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	67,98	66,30	1.154.400.000,00	1.091.875.832,00	94,58
2.14.03.1.01	<i>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</i>	<i>Ratio akseptor KB</i>	<i>%</i>	<i>0,76</i>	<i>0,76</i>	<i>1.154.400.000,00</i>	<i>1.091.875.832,00</i>	<i>94,58</i>
	<i>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>							
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1,00	1,00	78.000.000,00	76.682.180,00	98,31
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Daerah	1,00	1,00	137.400.000,00	131.753.750,00	95,89
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Daerah	1,00	1,00	40.077.474.996,00	883.439.902,00	94,08
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	%	63,46	64,54	1.205.668.000,00	1.099.928.821,00	91,23



2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan dan kesejahteraan keluarga	organisasi	4,00	4,00	987.010.000,00	893.279.559,00	90,50
2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1,00	1,00	793.810.000,00	707.479.382,00	89,12
2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi	1,00	1,00	193.200.000,00	185.800.177,00	96,17
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	%	30,00	30,00	218.658.000,00	206.649.262,00	94,51



2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan	1,00	1,00	218.658.000,00	206.649.262,00	94,51
-------------------	---	--	---------	------	------	----------------	----------------	-------

Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.28

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada Perangkat Daerah	%	75	86,49	115

Data didapat dari pengumpulan data pilah dari perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur per tahun. Dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kaltim yang memanfaatkan data gender}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kaltim}} \times 100$$

Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender sebanyak 32 OPD dari 37 OPD sehingga didapatkan capaian realisasi 86,49 %

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.29

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2024
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada Perangkat Daerah	%	65	65	100 %

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.30

Perbandingan ealisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2024)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada Perangkat Daerah	%	80	86,49	92 %

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.31

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada Perangkat Daerah	%	86,49	-	Tidak ada perbandingan kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :

- Capaian data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah
- Adanya kebijakan dan data regulasi yang memanfaatkan penggunaan data pilah sebagai dasar proses penyusunan program kegiatan
- Tingginya komitmen perangkat daerah dalam penyelenggaraan program one map one data sehingga data gender bagian dari hal tersebut
- Peningkatan kinerja petugas pengelola data kekerasan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Data kekerasan yang optimal

Faktor Kegagalan :

- Kurangnya kesadaran dan disiplin perangkat daerah dalam memberikan data secara terpilah
- Belum optimalnya pengelolaan data pilah di setiap stakeholder

Alternatif Solusi :

- Selalu memberikan pendampingan dan bimbingan kepada perangkat daerah dalam membuat laporan data terpilah
- Sosialisasi dan bimtek terkait penyusunan data pilah/data gender

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.32

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	100	88,36	.83 %

$$\text{Rasio Efisiensi Sasaran 5 : } \frac{845.963.848}{957.365.000} \times 100 = 83 \%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan pada Sasaran 5 Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak adalah sebesar 83 % masuk dalam kategori cukup efisien. Pada pelaksanaan program kegiatan sasaran 5 Capaian kinerja secara umum mengalami peningkatan yang baik, hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik pada belanja Honorarium tim dan perjalanan dinas.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	Persentase Capaian Data Gender dan anak	%	75,00	100,00	133,33	957.365.000,00	845.963.848,00	88,36
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	data	20,00	102,00	510	957.365.000,00	845.963.848,00	88,36
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	2,00	2,00	100	462.565.000,00	398.640.980,00	86,18
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	2,00	2,00	100	494.800.000,00	447.322.868,00	90,40

Sasaran 6 : Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.34

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	70,50	75,50	107 %

Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A diukur dari aspek kualitas yang dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Kualitas dengan Target Kualitas melalui Penghitungan capaian Sasaran Kinerja.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.35

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2022
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	96,84	96,20	101 %

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.36

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2025)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	71,50	75,50	106 %

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.37

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	proses	-	Tidak ada perbandingan kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4) **Faktor Keberhasilan :**

- Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kependudukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Faktor Kegagalan :

- Kurangnya SDM dalam pelayanan
- Sarana dan prasarana yang belum maksimal dalam menunjang pelaksanaan tugas

Alternatif Solusi :

- Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan semakin ditingkatkan

Aalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.38

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	proses	93,51	94 %

$$\text{Rasio Efisiensi Sasaran 6 : } \frac{22.120.618.109}{23.657.029.172} \times 100 = 94 \%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan pada Sasaran 6 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak adalah sebesar 94 % masuk dalam kategori cukup efisien. Pada pelaksanaan program kegiatan sasaran 16Capaian kinerja secara umum mengalami peningkatan yang baik, hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik pada belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

 Tabel 3.39
 Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Kode	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi i Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.08.2.14.2.1 2.01.	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					40.077 .474.9 96,00	36.894.635.174,00	92,06
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Pelayanan Keseekretariatan	indeks	82,00	90,00	23.6 57.029 .172,0	22.120.618.10 9,00	93,81
		Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	0		
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	70,50	75,50	595.02 5.900, 00	571.826.706,00	96,10
2.08.01.1.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	3,00	137.40 0.000, 00	131.858.000,00	95,97
2.08.01.1.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	111.06 3.900, 00	101.727.138,00	91,59
2.08.01.1.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	2,00	2,00	15.000 .000,0 0	15.000.000,00	100,00
2.08.01.1.01. 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	2,00	14.980 .000,0 0	14.980.000,00	100,00
2.08.01.1.01. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1,00	2,00	10.800 .000,0 0	10.800.000,00	100,00
2.08.01.1.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00	3,00	134.58 2.000, 00	126.580.701,00	94,05
2.08.01.1.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	171.20 0.000, 00	170.880.867,00	99,81
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	94,00	92,06	12.648 .110.3 96,00	12.244.979.465,00	96,81



2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	50,00	38,00	12.548.110.396,00	12.145.081.431,00	96,79
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	45.000.000,00	44.960.034,00	99,91
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16,00	16,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	2,00	20.000.000,00	19.938.000,00	99,69
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	orang	80,00	80,00	997.723.056,00	885.027.229,00	88,70
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	3,00	181.206.000,00	174.840.000,00	96,49
2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75,00	75,00	611.554.000,00	534.361.999,00	87,38
2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10,00	10,00	204.963.056,00	175.825.230,00	85,78
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	unit	111,00	111,00	3.392.660.016,00	3.264.714.220,00	96,23
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	15.000.000,00	14.995.000,00	99,97
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	6,00	223.000.000,00	222.935.524,00	99,97
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	148.179.016,00	148.178.000,00	100,00
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96,00	96,00	15.609.000,00	11.760.000,00	75,34
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	1,00	300.000.000,00	257.688.000,00	85,90



2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3,00	3,00	2.470.430,00	2.400.872.956,00	97,18
2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	1,00	220.442.000,00	208.284.740,00	94,49
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	32,00	32,00	1.205.007.164,00	1.071.155.000,00	88,89
2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	1,00	342.000.000,00	287.700.000,00	84,12
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30,00	30,00	863.007.164,00	783.455.000,00	90,78
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jenisjasa	4,00	4,00	3.890.445.940,00	3.591.911.039,00	92,33
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	21.086.000,00	20.530.000,00	97,36
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	608.884.000,00	371.717.039,00	61,05
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	91.410.000,00	91.398.600,00	99,99
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	3.169.065,94	3.108.265.400,00	98,08
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	unit	86,00	86,00	928.056.700,00	491.004.450,00	52,91
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	1,00	26.767.500,00	22.557.900,00	84,27
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24,00	33,00	262.560.000,00	262.262.550,00	99,89
2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	638.729.200,00	206.184.000,00	32,28

2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pencapaian SDG's Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Target Capaian Kinerja	Status Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	1 kebijakan	Perlu perhatian khusus
2	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	%	Perlu perhatian khusus

3. REALISASI ANGGARAN

a. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.41

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja		Anggaran		
		Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT	47,66	203	5.668.717.524	4.911.855.995	86,65
2	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	400	100	4.250.481.300	3.788.160.637	89,12
3	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	100	100	2.810.624.000	2.691.295.872	95,75



4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	1,93	131	2.733.258.000	2.536.710.713	92,81
5	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	100	133	957.365.000	845.963.848	83,36
6	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	75,50	107	23.657.029.172	22.120.618.109	93,51
Total				40.077.474.996	36.894.635.174	92,06

Analisis :

Pada realisasi anggaran berdasarkan perjanjian kinerja diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja meningkat dengan rata-rata capaian diatas 90 persen, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah

b. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

Tabel 3.42

Realisasi anggaran per program kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			40.077.474.996,00	36.894.635.174,00	92,06
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	indeks	23.657.029.172,00	22.120.618.109,00	93,81
	Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti	%			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	595.025.900,00	571.826.706,00	96,10
Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	137.400.000,00	131.858.000,00	95,97



Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	111.063.900,00	101.727.138,00	91,59
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	14.980.000,00	14.980.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	134.582.000,00	126.580.701,00	94,05
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	171.200.000,00	170.880.867,00	99,81
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	12.648.110.396,00	12.244.979.465,00	96,81
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12.548.110.396,00	12.145.081.431,00	96,79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	45.000.000,00	44.960.034,00	99,91



	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	20.000.000,00	19.938.000,00	99,69
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	orang	997.723.056,00	885.027.229,00	88,70
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	181.206.000,00	174.840.000,00	96,49
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	611.554.000,00	534.361.999,00	87,38
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	204.963.056,00	175.825.230,00	85,78
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	unit	3.392.660.016,00	3.264.714.220,00	96,23
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15.000.000,00	14.995.000,00	99,97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	223.000.000,00	222.935.524,00	99,97
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	148.179.016,00	148.178.000,00	100,00



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15.609.000,00	11.760.000,00	75,34
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	300.000.000,00	257.688.000,00	85,90
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.470.430.000,00	2.400.872.956,00	97,18
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	220.442.000,00	208.284.740,00	94,49
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>unit</i>	<i>1.205.007.164,00</i>	<i>1.071.155.000,00</i>	<i>88,89</i>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	342.000.000,00	287.700.000,00	84,12
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	863.007.164,00	783.455.000,00	90,78
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>jenisjasa</i>	<i>3.890.445.940,00</i>	<i>3.591.911.039,00</i>	<i>92,33</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	21.086.000,00	20.530.000,00	97,36
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	608.884.000,00	371.717.039,00	61,05
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	91.410.000,00	91.398.600,00	99,99
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3.169.065.940,00	3.108.265.400,00	98,08



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	unit	928.056.700,00	491.004.450,00	52,91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	26.767.500,00	22.557.900,00	84,27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	262.560.000,00	262.262.550,00	99,89
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	638.729.200,00	206.184.000,00	32,28
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	orang	4.250.481.300,00	3.788.160.637,00	89,12
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	lembaga	1.244.373.000,00	1.151.047.848,00	92,50
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan	462.600.000,00	431.158.717,00	93,20
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen	178.257.000,00	157.581.062,00	88,40
Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang	603.516.000,00	562.308.069,00	93,17



Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	lembaga	791.514.000,00	736.263.364,00	93,02
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	433.257.000,00	404.364.663,00	93,33
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	358.257.000,00	331.898.701,00	92,64
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	orang	2.214.594.300,00	1.900.849.425,00	85,83
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	Lembaga	170.400.000,00	150.246.436,00	88,17
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan /Hukum pd	Orang	1.787.737.300,00	1.535.797.372,00	85,91



	LPLPP Tingkat Provinsi				
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	Unit	256.457.000,00	214.805.617,00	83,76
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	1.981.341.360,00	1.641.277.746,00	82,84
<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak</i>	<i>Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan</i>	<i>Lembaga</i>	<i>1.378.937.600,00</i>	<i>1.075.596.241,00</i>	<i>78,00</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	772.137.600,00	501.922.319,00	65,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	PerangkatDa era h	606.800.000,00	573.673.922,00	94,54
<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu</i>	<i>%</i>	<i>602.403.760,00</i>	<i>565.681.505,00</i>	<i>93,90</i>
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan	Orang	112.360.000,00	103.723.085,00	92,31



	Pengaduan Masyarakat				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	490.043.760,00	461.958.420,00	94,27
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	Persentase Capaian Data Gender dan anak	%	957.365.000,00	845.963.848,00	88,36
<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam</i>	<i>Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</i>	<i>data</i>	<i>957.365.000,00</i>	<i>845.963.848,00</i>	<i>88,36</i>
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	462.565.000,00	398.640.980,00	86,18
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	494.800.000,00	447.322.868,00	90,40
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten/ kota layak anak	%	1.960.840.000,00	1.758.944.445,00	89,70
<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia</i>	<i>Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA</i>	<i>lembaga</i>	<i>1.130.890.000,00</i>	<i>952.060.789,00</i>	<i>84,19</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	490.200.000,00	358.114.318,00	73,05
Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas	perangkat daerah	640.690.000,00	593.946.471,00	92,70



	KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	lembaga	829.950.000,00	806.883.656,00	97,22
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	659.750.000,00	647.288.861,00	98,11
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	170.200.000,00	159.594.795,00	93,77
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	%	1.726.536.164,00	1.511.663.804,00	87,55
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	lembaga	566.095.064,00	466.349.970,00	82,38
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	566.095.064,00	466.349.970,00	82,38
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	laporan	299.066.000,00	278.550.800,00	93,14
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	36.701.076,00	30.526.000,00	83,17



Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	262.364.924,00	248.024.800,00	94,53
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat</i>	<i>Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak</i>	<i>Dokumen</i>	<i>861.375.100,00</i>	<i>766.763.034,00</i>	<i>89,02</i>
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen	861.375.100,00	766.763.034,00	89,02
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	1.859.900.000,00	1.814.809.483,00	97,58
<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</i>	<i>Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1.560.500.000,00</i>	<i>1.532.414.499,00</i>	<i>98,20</i>
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1.512.200.000,00	1.490.659.499,00	98,58
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	48.300.000,00	41.755.000,00	86,45
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran</i>	<i>Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Dokumen</i>	<i>299.400.000,00</i>	<i>282.394.984,00</i>	<i>94,32</i>
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	167.400.000,00	153.539.583,00	91,72
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	132.000.000,00	128.855.401,00	97,62
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	426.278.000,00	399.812.727,00	93,79
<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</i>	<i>Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil</i>	<i>Dokumen</i>	<i>226.700.000,00</i>	<i>206.983.770,00</i>	<i>91,30</i>



Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	182.600.000,00	170.580.770,00	93,42
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	44.100.000,00	36.403.000,00	82,55
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dokumen	199.578.000,00	192.828.957,00	96,62
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	91.460.000,00	86.119.057,00	94,16
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	108.118.000,00	106.709.900,00	98,70
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Publikasi data kependudukan skala provinsi	kali	524.446.000,00	476.673.662,00	90,89
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	%	344.100.000,00	304.877.267,00	88,60
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	150.000.000,00	140.450.662,00	93,63
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	44.100.000,00	23.103.000,00	52,39
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	150.000.000,00	141.323.605,00	94,22
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	180.346.000,00	171.796.395,00	95,26
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	48.346.000,00	47.782.275,00	98,83



Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	132.000.000,00	124.014.120,00	93,95
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	angka kelahiran total	%	373.190.000,00	344.906.060,00	92,42
<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	<i>Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</i>	<i>sektor</i>	<i>373.190.000,00</i>	<i>344.906.060,00</i>	<i>92,42</i>
Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	185.890.000,00	185.627.200,00	99,86
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Laporan	187.300.000,00	159.278.860,00	85,04
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	1.154.400.000,00	1.091.875.832,00	94,58
<i>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>	<i>Ratio akseptor KB</i>	<i>%</i>	<i>1.154.400.000,00</i>	<i>1.091.875.832,00</i>	<i>94,58</i>



(KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	78.000.000,00	76.682.180,00	98,31
Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Daerah	137.400.000,00	131.753.750,00	95,89
Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Daerah	939.000.000,00	883.439.902,00	94,08
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	%	1.205.668.000,00	1.099.928.821,00	91,23
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	organisasi	987.010.000,00	893.279.559,00	90,50
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	793.810.000,00	707.479.382,00	89,12



Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi	193.200.000,00	185.800.177,00	96,17
<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga</i>	<i>Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga</i>	%	218.658.000,00	206.649.262,00	94,51
Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan	218.658.000,00	206.649.262,00	94,51

BUDAYA KERJA DI DKP3A PROVINSI KALTIM

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur

5 BUDAYA KERJA DKP3A KALTIM



Budaya Kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mencari perbaikan atau penyempurnaan apa yang telah dicapai, dengan menerapkan metode-metode baru serta yakin akan kemajuan yang akan diperolehnya. Sebagai abdi masyarakat posisi pegawai negeri sipil, sebagai mesin birokrasi dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka memaksimalkan fungsi organisasi pemerintah. Selain tuntutan diatas tanggungjawab yang lain adalah menjaga serta memperbaiki citra para pegawai dimata masyarakat, karena sering dianggap sebagai pegawai yang tidak memiliki inovasi kerja yang tinggi sehingga kinerja organisasi dinilai kurang optimal. Pandangan memberi semangat cukup mendalam dan memungkinkan orang yang memahaminya memandang kerja, baik secara individual maupun berkelompok dalam suatu organisasi sebagai suatu keutamaan. Produktivitas kerja yang dihasilkan pada sebuah instansi-instansi pemerintahan hendaklah meningkat pada tiap kurun waktunya, akan tetapi sekarang jarang sekali kita lihat produktivitas tersebut bisa dijaga oleh orang yang berkecimpung didalamnya.

Pelaksanaan budaya kerja aparatur negara yang menjadi permasalahan diungkapkan oleh (KEP MEN PAN 2008) bahwa Pengabaian nilai-nilai moral dan budaya kerja menyebabkan permasalahan pada kondisi kinerja instansi pemerintah yakni: (1) Penilaian negatif dari masyarakat tentang pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah; (2) Kurangnya tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah sehingga kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat masih belum memuaskan; (3) Tidak diterapkannya nilai-nilai budaya kerja aparatur pemerintah menambah pencitraan yang buruk aparaturnya. (4) Kurangnya knowledge, skill, attitude pada diri aparatur pemerintah sehingga perlu ditingkatkan. Pelaksanaan budaya kerja aparatur Negara dengan nilai-nilai yang seharusnya merupakan langkah awal yang sebaiknya dipilih dalam upaya melakukan Reformasi birokrasi secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi birokrasi yang efisien dan efektif dengan aparatur yang bersih, transparan, dan professional dalam menjalankan tugasnya. Produktivitas merupakan sebuah alat rangkuman tentang jumlah dan kualitas performa pekerjaan, dengan mempertimbangkan pemanfaatan sumber-sumber daya. Filosofi mengenai produktivitas mengandung arti keinginan dan usaha dari setiap manusia untuk selalu meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya.

Pandangan memberi semangat cukup mendalam dan memungkinkan orang yang memahaminya memandang kerja, baik secara individual maupun berkelompok dalam suatu organisasi sebagai suatu keutamaan. Kuatnya budaya kerja akan terlihat dari bagaimana pegawai memandang budaya kerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku yang digambarkan memiliki motivasi, dedikasi, kreativitas, ke mampuan dan komitmen yang tinggi. Semakin kuat budaya kerja, semakin tinggi produktivitas yang dihasilkan pegawai. Dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan para aparatur Negara. Budaya kerja dapat diwujudkan setelah melalui proses yang panjang. Hal ini dikarenakan perubahan nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru akan memakan waktu untuk menjadi kebiasaan dan tak henti-hentinya terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan. Kepribadian tersebut menjadi sikap, kemudian menjadi perilaku yang mengandung unsur semangat. disiplin, rajin, jujur, tanggung jawab, hemat, integritas; sehingga hasil kerja akan mencapai kualitas yang tinggi atau memuaskan.

Evaluasi budaya kerja pada DKP3A Provinsi Kaltim yaitu untuk mengetahui :

- (1) Peran budaya kerja terhadap pegawai negeri sipil;
- (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai negeri sipil;
- (3) Untuk mengetahui dampak dari budaya kerja.

Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil di DKP3A Provinsi Kaltim, berpedoman pada Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 31 Tahun 2021 pedoman Pelaksanaan dan evaluasi penerapan budaya kerja di lingkungan Pemerintah daerah salah satunya yaitu apel masuk jam 8 pagi setelah itu memulai dengan aktivitas sesuai dengan tugas pokok masing-masing yakni urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat . Dengan diterapkannya peraturan tersebut dapat merubah perilaku setiap pegawai, baik itu kebiasaan lahir maupun faktor lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kerja pegawai negeri sipil yaitu dengan adanya peraturan yang mengatur tentang disiplin kerja pegawai dan dengan penerapan yang adil dan konsisten dapat menciptakan budaya kerja pegawai yang efektif dan efisien, karena mampu merubah kepribadian dan karakter para pegawai, memberikan perubahan mekanisme kerja pegawai.

Hal ini juga didukung dengan peran kepemimpinan dalam memberikan contoh sehingga para pegawai dapat mengikuti dan meneladani pimpinan dalam aktivitas sehari-hari, ada juga peran nilai-nilai budaya serta nilai-nilai keagamaan sehingga terciptanya budaya kerja yang kondusif yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan produktivitas pegawai sesuai dengan yang diharapkan.

Dampak Budaya Kerja

Dampak Budaya Kerja pegawai dapat menciptakan budaya kerja yang sangat kondusif dalam hal ini terciptanya suatu hubungan yang harmonis baik vertikal maupun horisontal dalam aktivitas sehari-hari yakni hubungan kekeluargaan, dimana hubungan antara Lurah dengan pegawai dan hubungan sesama pegawai serta hubungan dengan masyarakat sebagai penerima layanan semakin erat. Hubungan tersebut dapat membangkitkan semangat kerja pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dapat mengembangkan jati diri pegawai, memiliki rasa solidaritas yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mempunyai komitmen serta loyalitas yang tinggi terhadap produktivitas dan tujuan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN BUDAYA KERJA DKP3A PROVINSI KALTIM

Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil di DKP3A Provinsi Kaltim, berpedoman pada Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 31 Tahun 2021 pedoman Pelaksanaan dan evaluasi penerapan budaya kerja di lingkungan Pemerintah daerah. Dengan diterapkannya peraturan tersebut dapat merubah perilaku setiap pegawai, baik itu kebiasaan lahir maupun faktor lingkungan. Dalam hal ini juga tidak terlepas dari peran Lurah karena berangkat dari latar belakang perilaku yang berbeda sebagai seorang pimpinan Lurah memberikan contoh yang patut diteladani oleh para pegawai. Karena hal tersebut merupakan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sehingga selalu membiasakan diri datang tepat waktu, membiasakan diri untuk mematuhi tata tertip yang ditetapkan, dan dengan senang hati semangat untuk bekerja dengan ramah dalam melayani masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kerja pegawai negeri sipil di DKP3A yaitu dengan adanya peraturan yang mengatur tentang disiplin kerja pegawai, adanya peran kepemimpinan dalam memberikan contoh sehingga para pegawai dapat mengikuti dan meneladani pimpinan dalam aktivitas sehari-hari,

ada juga peran nilai-nilai budaya serta nilai-nilai keagamaan sehingga terciptanya budaya kerja yang kondusif yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan produktivitas pegawai sesuai dengan yang diharapkan Dampak dari budaya kerja pegawai di DKP3A Provinsi Kaltim dapat menciptakan budaya kerja yang sangat kondusif dalam hal ini terciptanya suatu hubungan yang harmonis baik vertikal maupun horisontal, dimana hubungan antara Pimpinan dengan pegawai dan hubungan sesama pegawai semakin erat. Hubungan tersebut dapat membangkitkan semangat kerja pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dapat mengembangkan jati diri pegawai, memiliki rasa solidaritas yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mempunyai komitmen serta loyalitas yang tinggi terhadap produktivitas dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

Pada Renstra Tahun 2024 - 2026, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 6 (enam) tujuan dan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 6 (enam) sasaran dapat dicapai dengan hasil baik.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

- SASARAN 1 Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT dengan capaian 47,67 %
- SASARAN 2 Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi dengan capaian 400 orang
- SASARAN 3 Meningkatnya cakupan kepemilikan dokmen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukandengan capaian 100 %
- SASARAN 4 Terkendalinya laju pertumbuhan pendudukn kinerja dengan capaian 1,93
- SASARAN 5 Menigkatnya ketersediaan data gender dan anakdengan capaian 86,49%
- SASARAN 6 Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlakcapaian kinerja dengan capaian 75,50 %

Untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi di masa mendatang, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan langkah-langkah optimalisasi, melalui :

1. Meningkatkan pelebagaan PUG di lembaga pemerintah tingkat provinsi dan mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelebagaan PUG di Kabupaten/Kota masing-masing melalui upaya pelatihan, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan;
2. Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan pemahaman pendidikan politik bagi perempuan dan advokasi kader organisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan;
3. Penurunan jumlah korban melalui upaya pencegahan (media KIE, kampanye, advokasi, kerjasama dunia usaha dan lembaga masyarakat) dan pengurangan risiko pada perempuan dan anak kelompok rentan (rawan terjadi tindak kekerasan);
4. Peningkatan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan SDM petugas layanan, tata laksana, sarana prasarana, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemanfaatan teknologi dan informasi serta mengembangkan jejaring penanganan korban;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur,



Hik Nurjan Sorayalita, SE, MMT
Pembina Utama Muda
NIP. 19651215 198601 2 0